DLHP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

# 2025

# LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan

# BAB IV
# PENUTUP

*L*aporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yang telah disahkan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja dalam Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil sebagai berikut :
   a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 75,15.
   b. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif masih N/A.
   c. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan mencapai angka 32.
   d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah mencapai angka 5,4.
   e. Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah mencapai angka 61,48.
   f. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulah sampah (%RT) mencapai angka 383,097,54 ton.
   g. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan mencapai angka 90%.

2. Permasalahan yang masih terjadi dalam Capaian tahun 2025 Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar Dissolved Oxygen (DO) atau Oksigen terkarut di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.

3. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya antara lain adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/ kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumsel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang.

Palembang, 30 Maret 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Herdi Apriansyah,S.STP,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumsel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang.

Palembang, 30 Maret 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan

Hardi Apriansyah,S.STP,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001